

Harian Pedoman: Media Ekspresi Ideologis Partai Sosialis Indonesia Menjelang Pemilu 1995

Ibnu Aghniya¹, Dewi Yuliati²

^{1,2} *Departemen Sejarah, Universitas Diponegoro*

*corresponding author: aghniyaibnu1998@gmail.com

Abstract. *This article contains a discussion of the role of the Pedoman daily in voicing the ideology of democratic socialism of the Indonesian Socialist Party (PSI) during the 1955 election campaign. The Pedoman daily was one of the largest newspapers at that time which was heavily influenced by the idea of PSI socialism. This is inseparable from the figure of Rosihan Anwar as editor in chief, who has political tendencies towards PSI. This study uses historical methods to reveal the daily progress and roles of the Pedoman for PSI during the 1955 election campaign period.*

Keyword:

Pedoman, PSI, Pemilu 1995, Ideology

Article Info

Received:
19 Mei 2021
Accepted:
2 Juni 2021
Published:
10 Juni 2021

1. Pendahuluan

Selain dikenal sebagai pemilihan umum (pemilu) pertama yang digelar dalam sejarah nasional, Pemilu 1955 juga memiliki arti penting lain jika ditinjau dari segi politis. Pemilu 1955 merupakan saluran legal bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara konstitusional. Selain itu, bagi partai-partai politik, Pemilu 1955 adalah agenda terpenting untuk memperoleh legitimasi kekuasaan, serta untuk menancapkan ideologi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan konteks waktu pada masa itu ketika Indonesia masih mengalami “krisis ideologi” yang ditandai dengan terpecahnya masyarakat ke dalam sekat-sekat ideologis yang kaku, Pemilu 1955 dipandang sebagai solusi konkret untuk menyudahi konflik ideologi yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan arti penting itu, selama masa kampanye berlangsung, partai-partai politik terlibat di dalam rivalitas sengit untuk dapat meyakinkan konstituen agar memilih partainya dalam pelaksanaan Pemilu 1955.

Dalam upaya tersebut, partai politik praktis membutuhkan suatu sarana penunjang yang dapat menyebarkan ideologi serta program partai kepada rakyat, dan dalam hal ini

surat kabar merupakan sarana yang paling fungsional untuk mengemban tugas itu.

Selain tuntutan kebutuhan yang datang dari partai politik, hal lain yang turut “mempolitisasi” dunia pers pada masa itu adalah sistem politik yang berlaku. Periode Demokrasi Liberal (1950-1959) dikenal sebagai era kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan pers. Dunia pers dapat menyuarakan opini, kritik, dan kecaman secara bebas tanpa merasa khawatir mendapat represi dari otoritas penguasa.

Kedua faktor utama di atas lantas mendorong pers untuk terlibat dalam dinamika perpolitikan nasional. Hampir sebagian besar surat kabar yang beredar memiliki afiliasi politik dengan partai politik, di antaranya adalah *Harian Rakjat* (PKI), *Abadi* (Masjumi), *Suluh Indonesia* (PNI), dan *Duta Masyarakat* (NU), dan beberapa koran partisan lain (Suwirta, 2008: 50).

Mengenai pentingnya kepemilikan surat kabar bagi partai dapat kita cermati dari peranan surat kabar *Harian Rakjat* bagi PKI, yang begitu vokal menyuarakan gagasan-gagasan PKI sehingga pada gelaran Pemilu 1955 partai tersebut mampu meraup suara yang sangat besar dan berhasil menduduki posisi keempat dalam daftar perolehan suara nasional. Padahal, tujuh tahun sebelumnya partai ini hancur-lebur karena Peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948.

Kiprah *Harian Rakjat* bagi PKI merupakan cerminan dari keberhasilan suatu partai politik dalam memaksimalkan potensi media massanya. Di sisi lain, terdapat contoh yang menggambarkan keadaan sebaliknya, yang tercermin dari peranan harian *Pedoman* bagi Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Sejak era revolusi, PSI menyandarkan kekuatan opininya kepada surat kabar *Pedoman* yang dipimpin oleh Rosihan Anwar, seorang wartawan kawakan yang memiliki reputasi tinggi dalam dunia pers Indonesia. Secara resmi, harian *Pedoman* memang tidak terikat langsung kepada PSI. Harian *Pedoman* tidak berada di bawah departemen tertentu dari partai—seperti misalnya *Harian Rakjat* yang ditempatkan di bawah Departemen Agitasi dan Propaganda PKI.

Selama eksistensinya dalam sejarah pers nasional, harian *Pedoman* adalah surat kabar yang cukup disegani. Selain karena sosok Rosihan Anwar yang memimpin harian tersebut, surat kabar ini juga memiliki tiras yang besar untuk ukuran masanya.

Tiras harian *Pedoman* diperkirakan mencapai 48.000 eksemplar perhari (Suwirta, 2008: 52). Jumlah ini jauh berada di atas harian *Abadi* milik Masjumi yang memiliki tiras 33.000 eksemplar perhari, atau dibandingkan dengan *Duta Masyarakat* milik NU yang tirasnya hanya berkisar di angka 15.000 eksemplar. Padahal, Masjumi dan NU adalah partai pemenang pemilu. Hanya *Harian Rakjat* saja yang mampu mengungguli *Pedoman* dalam jumlah tiras, yakni 55.000 eksemplar perhari (Suwirta, 2008: 52).

Namun demikian, nama besar harian *Pedoman* tidak menjadi jaminan bagi PSI untuk meraih kemenangan pada Pemilu 1955. Pada ajang pemilu tersebut, partai berlambang bintang segi lima ini hanya mampu meraih sedikit suara, tertinggal jauh dari lawan-lawan politiknya seperti PKI dan PNI.

Sebagai salah satu surat kabar terkemuka pada masanya serta memiliki afiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu, harian *Pedoman* menjadi suatu subjek kajian yang menarik untuk diteliti, terutama tentang fungsinya dalam menyuarakan ideologi sosialisme kerakyatan serta program-program PSI selama masa kampanye Pemilu 1955.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan sejarah adalah prosedur analitis yang ditempuh seorang sejarawan

untuk menganalisis kesaksian, yakni faktor sejarah sebagai bukti yang asli dan dapat dipercaya mengenai masa lampau manusia (Gottschalk, 1975: 18-19). Dalam metode sejarah terdapat empat langkah yang harus ditempuh oleh seorang sejarawan, yaitu tahap *heuristik* (pengumpulan sumber), *kritik* (pengujian sumber), *interpretasi* (menghubungkan satu fakta dengan fakta lain), dan *historiografi* (penulisan sejarah).

Pada tahap *heuristik*, seorang sejarawan melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah, primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan sumber-sumber sejarah berupa terbitan harian *Pedoman* dan *Harian Rakjat*, yang diperoleh dari layanan audio visual di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sumber-sumber yang peneliti kumpulkan berasal dari rentang waktu tahun 1953 hingga 1955.

Tahap selanjutnya adalah *kritik* atau pengujian sumber melalui kritik ekstern dan kritik intern (Gottschalk, 1975: 80-117). Kritik ekstern dilakukan untuk menguji keaslian (otentisitas) sumber sejarah yang diperoleh. Langkah kritik ekstern ini penting untuk dilakukan, karena sumber yang diragukan keasliannya memengaruhi pula kredibilitasnya. Setelah kritik ekstern dilakukan, pengujian sumber selanjutnya adalah melakukan kritik intern, yang dimaksudkan untuk menguji kebenaran (kredibilitas) informasi yang terdapat di dalam sumber sejarah. Caranya adalah melakukan uji silang dengan membandingkan informasi di dalam satu sumber sejarah dengan informasi di dalam sumber sejarah lain.

Pada tahap ini, selain menggunakan terbitan harian *Pedoman*, peneliti juga memanfaatkan sumber sejarah lain seperti *Harian Rakjat* untuk memperoleh perbandingan mengenai kebenaran informasi yang dimuat oleh harian *Pedoman*.

Tahap ketiga adalah *interpretasi*, yaitu menghubungkan satu fakta sejarah dan fakta lainnya dengan menggunakan bantuan sederet konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, serta menggunakan imajinasi historis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah *historiografi* (penulisan sejarah). Pada tahap ini seorang sejarawan yang telah memperoleh sumber-sumber sejarah dan mendapat gambaran utuh mengenai permasalahan yang diteliti, menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Partai Sosialis Indonesia (PSI)

Pembentukan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tanggal 12 Februari 1948 merupakan langkah solutif dari perpecahan yang terjadi di dalam Partai Sosialis. Sebelumnya, Partai Sosialis merupakan wadah politik bagi kaum sosialis di Indonesia pasca kemerdekaan yang terdiri atas dua faksi utama, yakni kelompok Sutan Sjahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, kedua tokoh yang memiliki basis pendukung masing-masing ini berinisiatif untuk membentuk satu partai bersama yang memiliki landasan prinsip serupa, yakni penentangan terhadap pemerintahan Presiden Sukarno yang dianggap “berbau fasis” karena didominasi oleh kalangan yang pernah bekerja sama dengan pemerintah fasisme Jepang. Kemudian kedua tokoh ini berhasil mendirikan Partai Sosialis pada bulan Desember 1945 (Tempo, 2010: 51).

Namun demikian, dalam perkembangannya partai ini terus mengalami gesekan di dalam internalnya sebagai akibat dari perbedaan pandangan dan bahkan kepentingan politik. Penentangan kubu Sjahrir terhadap paham fasisme dimotivasi oleh ideologi sosialisme

demokrat yang memang menentang segala bentuk pemerintahan totaliter ataupun diktator, sedangkan penentangan kubu Amir terhadap fasisme dimotivasi oleh arahan politik dari organisasi Komunisme Internasional (Komintern) yang dikenal sebagai “garis Dimitrov” yang berisi komando bagi kaum komunis internasional untuk bekerja sama dengan kekuatan kapitalis untuk melawan fasisme.

“Garis Dimitrov” ini dicetuskan pada tahun 1937, atau menjelang pecahnya Perang Dunia II yang melibatkan kekuatan kapitalis, komunis, serta fasis di masing-masing pihak. Sesudah berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan hancurnya kekuatan fasisme di dunia, “Garis Dimitrov” ini dianggap tidak relevan lagi. Dengan demikian kaum komunis internasional kembali pada agenda utamanya, yaitu menghancurkan kapitalisme (Soe Hok Gie, 2005).

Perubahan kebijakan itu kemudian mendorong kubu Amir Sjarifuddin di dalam Partai Sosialis bergerak menjadi suatu faksi komunis yang sangat radikal. Amir Sjarifuddin beserta rekan-rekan komunisnya menyudutkan kelompok Sjahrir yang dipandang terlalu lemah dalam menghadapi Belanda.

Tekanan hebat dari kelompok komunis di dalam Partai Sosialis ini meyakinkan Sutan Sjahrir untuk segera mengambil keputusan penting sebelum kelompoknya “ditendang” keluar dari Partai Sosialis. Pada 12 Februari 1948 Sjahrir mendirikan PSI yang bebas dari pengaruh kaum komunis (Argenti, 2017: 7).

Dalam perkembangannya, PSI diperhitungkan sebagai partai elite dalam kancah perpolitikan nasional, setidaknya sampai pemilu pertama tahun 1955. Kader-kader PSI didominasi oleh kalangan eks-Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), sebuah organisasi politik pada masa pergerakan nasional yang dipimpin oleh Hatta dan Sjahrir (Yohana, 2010: 61). Hal ini—yakni komposisi PSI yang didominasi oleh eks-kader PNI Baru, berperan penting untuk memahami karakteristik PSI sebagai sebuah partai kader yang cenderung bersifat elitis, dan terpisah dengan massa rakyat.

Aspek lain yang menarik untuk dicermati dari PSI adalah masalah ideologi. PSI menganut ideologi sosialisme demokrat yang pada masa itu tengah populer di negara-negara Eropa Barat. Ciri khas dari ideologi ini adalah strategi perjuangannya yang menekankan pada gerakan parlementarisme. Sosialisme demokrat meyakini bahwa masyarakat sosialis sebagai cita-cita ideal tidak harus diwujudkan melalui cara kekerasan atau revolusi seperti yang diyakini oleh kaum komunis (Argenti, 2017: 8). Kaum sosialis demokrat meyakini bahwa sosialisme dapat diwujudkan dengan cara evolusioner, yaitu perubahan susunan masyarakat secara bertahap.

Pemikiran sosialisme demokrat pertama kali dicetuskan oleh Eduard Bernstein yang merevisi paham marxisme, dan mengarahkan gerakan kaum sosialis lewat cara-cara konstitusional dan legal. Bernstein tidak setuju dengan pendapat Karl Marx yang menyatakan bahwa masyarakat sosialis hanya dapat dicapai melalui jalan revolusi karena kepentingan yang “tak terdamaikan” antara *the have* (kelas borjuis) dan *the have not* (kelas proletar). Sebaliknya, menurut Bernstein masyarakat sosialis justru dapat diwujudkan melalui jalan setahap demi setahap alias bersifat evolusi. Bahkan kalau perlu digalang kerja sama dengan partai atau golongan-golongan borjuis (Wibisono, 1950: 14).

Meskipun pada dasarnya ideologi dari PSI adalah sosialisme demokrat, Sutan Sjahrir cenderung menghindari penggunaan istilah tersebut karena ideologi tersebut dipahami oleh kalangan lain sebagai paham yang cenderung kebarat-baratan. Sebagai gantinya, Sjahrir merumuskan istilah “sosialisme kerakyatan” dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Dalam hal ini peneliti memandang bahwa langkah Sjahrir merupakan langkah

politis untuk mendekatkan PSI dengan massa rakyat.

Untuk melihat masyarakat seperti apa yang dicita-citakan oleh sosialisme kerakyatan ala PSI, berikut ini adalah petikan pemikiran Sjahrir tentang masyarakat sosialis:

“Yaitu suatu masyarakat yang tidak mengenal penghisapan dan penindasan. Artinya suatu masyarakat di mana tiada terdapat orang yang sengsara dan mati kelaparan sedangkan ada pula orang lain yang hidup dalam kemewahan dan kekayaan yang berlebihan, suatu masyarakat yang mana tidak terdapat segolongan kecil orang menguasai kehidupan orang banyak yang lain secara ekonomis ataupun politis. Apalagi masyarakat yang segolongan kecil tersebut dapat memperkaya diri mereka atas dasar kemiskinan dan kebodohan golongan manusia yang terbesar” (Sjahrir, “*Sosialisme Indonesia*”, dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis, 1955).

Inti dari gagasan sosialisme kerakyatan PSI tersebut adalah masyarakat yang berkeadilan dan tidak ada penindasan manusia oleh manusia lain (*exploitatie d'i homme par i'homme*), suatu hal yang sulit untuk diwujudkan dalam masyarakat yang menganut kapitalisme dan feodalisme.

Sebelumnya telah disinggung bahwa keanggotaan PSI yang didominasi oleh kader-kader eks-PNI Baru merupakan kunci untuk memahami karakteristik dari PSI. Hal itu dapat dijelaskan bahwa secara historis PNI Baru merupakan sebuah kelompok yang muncul ke tengah pergerakan nasional dengan menawarkan strategi perjuangan lewat pendidikan politik bagi kader-kader perjuangan, sebagai jawaban dari gerakan nasional yang terlalu menekankan pada gaya agitasi massa.

Konsekuensi dari pendidikan politik ini adalah perjuangan kemerdekaan akan memakan waktu yang lama, serta tidak semua orang dapat terlibat di dalamnya. Untuk memahami istilah-istilah dan konsep, serta melakukan analisis politik, kader yang dibina haruslah orang yang berpendidikan. Padahal ketika itu masih sedikit rakyat bumiputera yang menikmati pendidikan, bahkan sebagian besar masih buta huruf.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendidikan politik ala PNI Baru ini “kurang laku” di tengah rakyat bumiputera, walaupun gagasan tersebut sudah melampaui zamannya. Dengan demikian kelompok ini cenderung bersifat elitis, berbeda dengan kelompok yang mengandalkan aksi massa dan agitasi.

Setelah Indonesia merdeka, keterasingan dan sifat elitis ini diwarisi oleh PSI. Meskipun demikian, PSI tetap diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional, karena kader-kadernya banyak yang berasal dari kalangan intelektual, yang ketika itu sangat dibutuhkan untuk ikut dalam pembangunan negara. Dalam beberapa kabinet yang dibentuk selama periode Demokrasi Liberal, PSI mengirimkan kader-kadernya untuk menduduki pos penting di dalam kabinet.

3.2 Harian Pedoman dan Para Pengasuhnya

3.2.1 Pendirian Harian Pedoman

Proses awal pendirian harian *Pedoman* dimulai ketika pada tahun 1948 R.H.O. Djunaedi, pemilik surat kabar *Pemandangan*, ingin mendirikan satu koran lagi yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi kaum republikan pada zaman revolusi. Keinginan Djunaedi tersebut disampaikan oleh Soemanang Soerjowinoto selaku pemimpin redaksi *Pemandangan* kepada Rosihan.

Syarat yang diajukan oleh Djunaedi untuk koran barunya tersebut adalah menyematkan huruf “P” di depan nama surat kabar seperti koran *Pemandangan* yang ia terbitkan (Padiatra, 2010: 6). Kemudian Rosihan pun mengambil kesempatan tersebut dan mengusulkan nama “Pedoman” untuk koran baru itu. Djunaedi yang hanya meminta syarat tersebut tidak keberatan dan menyetujuinya.

Debut harian *Pedoman* terjadi pada tanggal 29 November 1948, ketika revolusi Indonesia sedang menghadapi masa-masa paling kritis, akibat Agresi Militer Belanda dan Pemberontakan PKI Madiun. Sesuai dengan tujuan awalnya, *Pedoman* pun memainkan peranan sebagai corong suara kaum republikan dan mengabarkan setiap perjuangan revolusi Indonesia.

Selain Rosihan yang menjabat sebagai ketua dewan redaksi, turut pula di dalam dewan redaksi adalah Soedjatmoko dan Sanjoto, sedangkan posisi direksi surat kabar ini diemban oleh Abu Bakar Loebis (*Pedoman*, 2 Januari 1955). Susunan dewan redaksi harian *Pedoman* ini penting untuk dicermati, sebab orang-orang tersebut memiliki afiliasi politik dengan PSI.

Dari segi kepemilikan, harian *Pedoman* tidak dimonopoli oleh satu orang tertentu. Hak milik atas saham harian *Pedoman*—yang merupakan bagian dari N.V. Badan Penerbit “Pedoman”, dibagi sama rata kepada para karyawan serta wartawannya, persis seperti idealisme sosialis yang diusung oleh *Pedoman* (Padiatra, 2010: 8).

3.2.2 Pengasuh Harian Pedoman

Harian *Pedoman* merupakan surat kabar yang menerapkan gaya jurnalistik *personal journalism*, yaitu jurnalisme yang sangat dipengaruhi oleh sosok pemimpin redaksinya. Konten-konten di dalam koran yang menerapkan *personal journalism*, mencerminkan ide dan pemikiran seorang pemimpin redaksi dan dewan redaksi. Oleh karena itu peneliti menganggap penting untuk mengungkap orang-orang yang berada dibalik harian *Pedoman*. Dengan memahami latar belakang dan pemikiran orang-orang tersebut, proses untuk menganalisis surat kabar tersebut menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

a. Rosihan Anwar

Rosihan Anwar lahir di Kubang Nan Dua, Sumatera Barat pada 10 Mei 1922. Ayahnya merupakan pegawai kolonial dengan jabatan asisten demang yang bernama Maharadja Soetan (Rosihan, 1983: 19). Sebagai putra dari seorang pegawai kolonial, Rosihan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang pada masa itu aksesnya masih terbatas bagi kaum bumiputera. Ia pernah mengenyam pendidikan di *Holland Inlandsche School* (HIS), *Meer Uitgebried Lager Onderwijs* (MULO) Padang, dan *Algemeene Middelbare School* (AMS) Bagian A di Yogyakarta (Desi Rusmiati, dkk, 2018). Latar belakang pendidikannya yang bergaya Barat ini turut berkontribusi dalam membentuk sosok Rosihan sebagai seorang figur yang memiliki kecenderungan pada gagasan-gagasan Barat seperti demokrasi dan sosialisme.

Perkenalan Rosihan dengan sosialisme terjadi pada saat usianya masih muda. Ketika merantau ke Yogyakarta untuk belajar di AMS Jurusan Sastra Klasik Barat, Rosihan bertemu dengan dua orang yang menyemai pemikiran sosialisme kepada dirinya, yaitu Dr. Tjan Tjoe Siem, pemilik pondokan tempatnya tinggal, dan H.J. Van Den Berg, guru sejarahnya (Padiatra, 2018: 3). Persinggungan Rosihan dengan kedua orang itu bisa memberikan penjelasan, mengapa sosok Rosihan yang berasal dari keluarga priyayi yang seharusnya konservatif, justru menjadi sosok yang tertarik pada ide-ide progresif seperti

demokrasi dan sosialisme.

Pemahaman Rosihan tentang sosialisme memang tidak sedalam yang dimiliki oleh Sutan Sjahrir atau tokoh-tokoh PSI lain. Menurut pengakuannya, ia memahami sosialisme sebatas suatu ide filosofis yang ideal, yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan.

Persinggungan Rosihan dengan dunia jurnalistik baru terjadi ketika masa pendudukan Jepang. Ia mengawali karier sebagai jurnalis setelah mengambil tawaran untuk bekerja di koran *Asia Raja*. Setelah proklamasi kemerdekaan, karier Rosihan sebagai jurnalis meningkat pesat ketika dirinya memimpin surat kabar *Pedoman* yang pertama kali terbit pada bulan November 1948.

Kiprah Rosihan selama berkecimpung dalam dunia jurnalistik bukan sekadar karena tuntutan memenuhi kebutuhan hidup atau mencari nafkah. Ia juga dikenal sebagai seorang jurnalis yang memiliki pemikiran idealis. Secara khusus ia menyoroti konsep serta penerapan sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Selain itu, ia juga memiliki pandangan tersendiri tentang kebebasan pers, yang pada masa itu mengalami tantangan berat dari pemerintahan otoriter.

Dalam pandangan Rosihan, Demokrasi Liberal tidak selalu memiliki konotasi negatif seperti yang dipersepsikan banyak orang (Rosihan, 1983: 122). "Liberalisme" yang sering dipandang sebagai barang impor dari Barat, selalu dianggap tidak cocok dengan jiwa masyarakat Indonesia. Padahal menurutnya, demokrasi merupakan sistem kenegaraan yang bisa diterima secara universal karena memiliki standar tertentu seperti pemilihan umum yang bebas, kompetisi yang sehat antar-partai politik, hingga adanya suatu sistem perwakilan dalam pemerintahan. Namun demikian, ia merasa skeptis bahwa demokrasi ideal semacam itu bisa diterapkan secara baik di negara-negara Dunia Ketiga.

Selain tentang demokrasi, Rosihan juga menaruh perhatian khusus pada isu kebebasan pers yang ada di Indonesia. Menurutnya, kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan dengan tetap mempertimbangkan aspek tanggung jawab. Kebebasan pers jelas diperlukan bagi iklim pers yang sehat. Karena pers selain berfungsi menyampaikan berita (*news*) dan opini (*views*), juga bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Fungsi itu tidak akan bisa terwujud jika kebebasan pers dikebiri oleh penguasa lewat berbagai macam peraturan. Namun demikian, ada yang menarik untuk dicermati, Rosihan tidak memandang kebebasan pers sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan secara mutlak. Menurutnya, perjuangan kebebasan pers juga harus mempertimbangkan permintaan pasar, yang hanya bisa dipenuhi bila tidak ada tekanan dari penguasa. Rosihan pun cenderung untuk meminimalisasi konfrontasi dengan penguasa (Desi Rusmiati, dkk, 2018).

Pandangannya tersebut tercermin ketika ia menandatangani peraturan 19 Pasal yang diwajibkan pemerintah Orde Lama. Meskipun ia merasa tidak cocok dengan sistem Demokrasi Terpimpin ala Presiden Sukarno, namun ia tetap bersikap fleksibel, demi menyelamatkan surat kabarnya. Langkah kooperatif Rosihan yang mau menandatangani peraturan ini pula yang menyebabkannya berpolemik dengan tokoh pers nasional lain yang cukup disegani, yaitu Mochtar Lubis, pemimpin redaksi harian *Indonesia Raja*. Walaupun demikian, harian *Pedoman* tetap diberedel oleh penguasa karena tidak bisa melepaskan karakter kritis yang telah melekat kuat pada koran ini.

b. Soedjatmoko

Soedjatmoko lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat pada 10 Januari 1922, ketika sang

ayah ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk berdinias di kota itu. Ia merupakan saudara dari Siti Wahjunah (akrab dikenal sebagai Poppy Sjahrir), Dr. Miriam Budiardjo, dan Nugroho Wisnumurti (Nursam, 2006: 50-51).

Soedjatmoko menempuh pendidikan dasar di Menado, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke *Hogere Burger School* (HBS) Surabaya, dan masuk ke *Geneeskundige* (sekolah tinggi kedokteran) Batavia. Studinya di perguruan tinggi kedokteran itu gagal diselesaikannya karena ia dikeluarkan oleh pihak sekolah pada tahun 1943, akibat ketahuan terlibat dalam gerakan bawah tanah anti-Jepang (Abidin, 2015: 3).

Usai dikeluarkan dari sekolah kedokteran, Soedjatmoko pulang ke rumah orang tuanya di kota Solo. Selama masa vakum di Solo inilah Soedjatmoko mengalami tahap paling menentukan dalam perkembangan intelektualitasnya. Ia tidak lagi memandang pengetahuan yang diperoleh dari bahan bacaan sebagai “barang-barang koleksi” yang harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi pengetahuan harus dipandang sebagai modal bagi manusia untuk mempertinggi akal dan jiwanya, serta menebar manfaat seluas-luasnya pada masyarakat (Mahasin, 1983: xi).

Memasuki zaman revolusi, Soedjatmoko yang telah memiliki koneksi dengan mahasiswa-mahasiswa gerakan bawah-tanah selama pendudukan Jepang, turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dengan berperan sebagai jurnalis dan diplomat. Atas komando dari Sjahrir, ia bersama dengan Sudarpo Sastrosatomo dan Sanjoto mendirikan majalah *Het Inzicht* (*The Insight*) pada tahun 1946, sebagai reaksi untuk menandingi majalah *Het Uitzicht* (*The Outlook*) yang diterbitkan oleh Belanda (Handayani, 2020: 3).

Setahun berikutnya, ia menerbitkan jurnal sosialis terkemuka bernama *Siasat* yang merupakan corong suara PSI di samping harian *Pedoman*. Jurnal tersebut merupakan majalah mingguan yang berisi pandangan-pandangan sosialisme kerakyatan PSI.

Karier jurnalistik yang baru dimulainya sejak menerbitkan *Het Inzicht* pada tahun 1946 harus terhenti, karena sejak tahun 1947 hingga 1950 ia ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi delegasi Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain menjadi perwakilan Indonesia di PBB, Soedjatmoko juga ditugaskan untuk membenahi kantor kedutaan besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang semula ditempati duta besar pemerintah Hindia Belanda.

Setelah menunaikan tugasnya di AS, pada tahun 1952 Soedjatmoko kembali ke Indonesia, dan kembali bergabung dengan dewan redaksi *Siasat* serta harian *Pedoman* yang dipimpin oleh Rosihan Anwar. Kemudian ia mendirikan usaha penerbitan buku bernama *Pembangunan*, nama yang dimaksudkan sebagai sindiran kepada pemerintah yang ketika itu menyepelekan aspek pembangunan (Handayani, 2020: 4).

Kiprahnya di dunia politik terekam selama bergabung dengan PSI. Sebagai salah seorang *triumvirat* dari kelompok *Sjahririest* (orang-orang Sjahrir), Soedjatmoko adalah tokoh utama PSI dalam kancah perpolitikan nasional selama periode Demokrasi Liberal. Ia mewakili fraksi PSI di Majelis Konstituante yang bersidang sejak tahun 1956 hingga 1959.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, setelah partainya dibubarkan karena terlibat dalam gerakan PRRI/Permesta, Soedjatmoko memilih untuk menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Sukarno, dan turut serta dalam pembentukan Liga Demokrasi untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin membesar. Namun usahanya itu gagal, dan ia lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan.

Memasuki era baru yang ditandai tumbangannya kekuasaan Presiden Sukarno dan naiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden, Soedjatmoko kembali memainkan peranan

aktif dalam kehidupan kenegaraan. Pada tahun 1966 ia diangkat menjadi wakil ketua delegasi Indonesia untuk PBB dan setahun kemudian diangkat menjadi penasihat delegasi.

Pada tahun 1968 hingga 1971 Soedjatmoko ditugaskan oleh pemerintah Orde Baru sebagai duta besar Indonesia untuk AS. Berturut-turut setelah kepulangannya ke Indonesia pada tahun 1971, ia menjabat sebagai penasihat Bappenas, Lemhanas, dan Wanhamkamnas. Ketika meletus peristiwa Malari pada tahun 1974, Soedjatmoko dan orang-orang eks-PSI dikenai tuduhan berada dibalik aksi tersebut, dan dikenakan cekal selama 2,5 tahun oleh pemerintah.

Kariernya di bidang pendidikan terbilang mengagumkan, sebab meskipun tidak pernah menuntaskan pendidikan formalnya, Soedjatmoko berhasil meraih sederet penghargaan. Pada tahun 1969 dan 1970 ia dianugerahi dua gelar doktor *honoris causa* dari dua universitas yang berbeda, yaitu *doctor of law* dari Universitas Cedar Crest, dan *doctor of humanities* dari Universitas Yale.

Selanjutnya pada tahun 1978 ia mendapatkan penghargaan *Ramon Magsaysay Award for International Understanding*, karena perhatian serta kontribusinya pada masalah pembangunan Dunia Ketiga (Handayani, 2020: 6). Kemudian sejak 1980 hingga 1987 ia disertai jabatan sebagai Rektor Universitas PBB di Jepang. Pada tahun 1989 Soedjatmoko meninggal dunia usai memberikan kuliah di UGM.

Sepanjang hidupnya Soedjatmoko mengabdikan diri kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Meski gagal menamatkan sekolah formalnya, sosok Soedjatmoko dikenang sebagai tokoh intelektual kenamaan Indonesia, yang banyak menyumbangkan pemikiran serta pendapat di berbagai disiplin ilmu sosial. Pemikirannya merentang jauh menembus sekat-sekat disiplin ilmu.

3.2.3 Pedoman: Corong Suara PSI Menjelang Pemilu 1955

Sebagai sebuah surat kabar yang tidak terikat langsung secara struktural kepada organisasi partai (*party-bound*), harian *Pedoman* menempuh cara tersendiri dalam mengkampanyekan PSI selama masa kampanye Pemilu 1955.

Ketika terjadi suatu polemik di tengah masyarakat, PSI tidak serta-merta mengajukan konsepsi-konsepsi PSI sebagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut, namun dengan menyisipkan ide-ide ala PSI secara implisit.

Namun demikian, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 1955, harian *Pedoman* pun mengalami transformasi dalam konteks sebagai corong suara bagi PSI. Transformasi yang ditunjukkan harian *Pedoman* tercermin dari perubahan corak redaksinya yang sebelumnya terkesan “malu-malu” untuk menunjukkan afiliasi politik dengan PSI, menjadi surat kabar yang terang-terangan mendukung PSI dalam Pemilu 1955. Perubahan drastis itu terjadi setelah Kongres II PSI digelar pada bulan Juni 1955. Sejak saat itu harian *Pedoman* dengan gencar dan terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada PSI dalam Pemilu 1955

Hal itu tidak terlepas dari konsolidasi partai yang dilakukan menjelang pemilu berlangsung melalui mekanisme kongres. Dalam pelaksanaan kongres, partai biasa menyusun program kerja dan menetapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapi pemilu.

(1) Sebelum Kongres II PSI

Selama masa kampanye Pemilu 1955 yang berlangsung sejak dikeluarkannya UU No. 7 1953 tentang pemilu hingga pelaksanaan pemilu pada tahun 1955, harian *Pedoman*

memainkan peranan sebagai “corong suara” bagi PSI, dengan mengkampanyekan ideologi dan program partai, serta terlibat di dalam polemik sengit dengan lawan-lawan politik PSI.

Sejak dimulainya masa kampanye hingga digelarnya Kongres II PSI yang menandai transformasi strategi kampanye PSI dan *Pedoman*, beragam isu dimuat oleh harian *Pedoman* dengan “membungkus”-nya sebagai bahan kampanye. Isu-isu itu antara lain adalah; kebijakan lisensi-istimewa Iskaq, kesulitan ekonomi dan korupsi, hingga polemik dengan PKI.

Berbagai isu yang sering dimuat oleh harian *Pedoman* itu sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari satu masalah mendasar yang terjadi selama masa kampanye (dan juga selama periode Demokrasi Liberal), yaitu pertentangan politik antara pemerintah di satu pihak dan oposisi di pihak lain (Feith, 1999: 14-15).

Berikut ini adalah beberapa contoh isu yang dimuat dalam harian *Pedoman*, dan memiliki muatan politis dalam kegiatan kampanye pemilu.

a. Lisensi Istimewa Iskaq

Di antara kebijakan-kebijakan kabinet Ali yang dikritisi oleh harian *Pedoman* adalah kebijakan lisensi-istimewa bagi importir yang diterbitkan oleh Menteri Ekonomi Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo pada tahun 1954. Kebijakan itu dinilai diskriminatif, berbau korupsi, dan mengakibatkan naiknya harga barang.

Kebijakan ini dicurigai sarat dengan praktik korupsi dan nepotisme, karena lisensi-istimewa impor yang dikeluarkan oleh pemerintah diberikan kepada pihak-pihak yang dikenal memiliki kedekatan khusus pada pejabat pemerintah. Tidak hanya itu, lisensi-istimewa ini juga dinilai menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan kepartaian. Pada bulan September 1954, salah satu partai koalisi pemerintah yaitu Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), diduga menerima keuntungan dari hasil pembagian lisensi-istimewa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Perusahaan Tjokro milik PSII, sebesar 2.500.000 rupiah (*Pedoman*, 9 November 1954).

Kebijakan lisensi khusus importir ini merupakan skandal panas tingkat nasional yang berjalan selama berbulan-bulan pada akhir tahun 1954. Bahkan, kebijakan ini menyebabkan Mr. Iskaq harus dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Ekonomi dan digantikan oleh Ir. Rooseno dari Partai Indonesia Raya pimpinan Wongsonegoro (PIR Wongsongso) pada 4 November 1954 (*Pedoman*, 5 November 1954). Kemudian Iskaq harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang selama menjabat sebagai Menteri Ekonomi (*Pedoman*, 9 Desember 1954).



Karikatur ejekan pada eks-Menteri Ekonomi Iskaq yang membagi-bagikan lisensi istimewa pada pihak-pihak tertentu (Sumber: *Pedoman* 11 Oktober 1954)

Sebelum menjadi semakin tak terkendali dan berubah menjadi “senjata” bagi pihak oposisi untuk menjatuhkan kabinet, Menteri Rooseno menghapus kebijakan pendahulunya tersebut (*Pedoman*, 17 November 1954). Kemudian ia diminta untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih rasional dan transparan daripada kebijakan sebelumnya

b. Kesulitan Ekonomi dan Korupsi

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa kebijakan lisensi-istimewa impor yang dikeluarkan oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo selain bersifat diskriminatif dan menjadi lahan korupsi, juga menimbulkan kesulitan ekonomi yang nyata bagi masyarakat kecil. Harga-harga bahan pokok membumbung tinggi dan sulit didapat, padahal sebelumnya rakyat sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Krisis yang mengenai langsung pokok hidup banyak orang tersebut membuat “gerah” Rosihan Anwar. Lewat tajuk rencana di harian *Pedoman* ia menuangkan kritiknya kepada pemerintah, partai koalisinya, serta pihak-pihak yang mengambil untung di masa sulit.

Selain itu, tajuk rencana tersebut menyiratkan paham sosialisme-kerakyatan ala PSI yang menekankan pentingnya praktik kenegaraan yang demokratis. Berikut adalah kutipan dari tajuk rencana karangan Rosihan yang berjudul “*Krisis dan alternatifnja*”:

“...Hanja kaum komunis dan fascis jang mempunjai satu djawaban sadja terhadap persoalan krisis tsb. Resepnja telah tersedia, dalam buku2 teks mereka telah ditunjdjukan djalan apa jang mesti ditempuh, jakni satu sadja ialah djalan mereka. Itupun kalau kaum komunis dan fascis mengakui adanja krisis di Indonesia dewasa ini.

...kemauan untuk membangun, jang penting pula artinja pada djalan keluar dari krisis dewasa ini. Kemauan itu boleh dibilang salah satu kuntji persoalan, djika orang memperbintjangkan misalnja pembangunan ekonomi di suatu negeri.

..PNI mau mewujudkan apa jang dinamakannja “ekonomi nasional” atau “ekonomi marhaenis”. Dan kitapun tak apriori akan berburuk-sangka dan pertjaja bahwa PNI sungguh-sungguh menginginkan perbaikan nasib rakjat. Tapi apa sebenarnja praktek PNI dan apakah akibatnja politik lisensi istimewa Iskaq? Rakjat itu jang bertambah2 penderitaannja. Teranglah bahwa politik jang mereka djalankan itu kandas.

Maka alternatifnja ialah pembangunan dengan mengadjak rakjat turut serta setjara demokratis, hanja mereka itulah jang lebih banjak kans untuk membawa Indonesia keluar dari krisisnya dewasa ini” (*Pedoman*, 11 Oktober 1954).

Dari artikel tersebut dapat dipahami bagaimana cara Rosihan menyampaikan kritiknya yaitu dengan gaya menyindir lawan, baik kepada kaum komunis yang selalu terpaku secara dogmatis pada buku teks mereka, maupun kepada pemerintah yang diwakili PNI dengan mengungkit-ungkit kembali skandal lisensi istimewa Mr. Iskaq.

Selain itu Rosihan juga menyampaikan solusi untuk mengatasi krisis yang terjadi ketika itu dengan mengajak seluruh golongan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, tanpa membedakan latar belakang sosialnya. Meski demikian, solusi tersebut memang masih terasa “mengawang” dan abstrak, karena baru sebatas gagasan yang bersifat umum tanpa mengajukan solusi riil berupa program, misalnya sistem ekonomi sosialisme. Barangkali hal ini disebabkan pemahaman Rosihan yang tidak terlalu mendalam tentang sosialisme seperti yang diakuinya sendiri di dalam otobiografinya.

Di samping kesulitan ekonomi, masalah lain yang terus diangkat oleh harian *Pedoman* adalah kasus korupsi. Sejak skandal lisensi-istimewa Iskaq yang mengemuka dan menimbulkan goncangan politik nasional, pemerintah Ali sebetulnya sudah kehilangan kepercayaan publik (*public trust*) dalam transparansi keuangan. Urusan catut-mencatut seakan menjadi rahasia umum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan para pemimpin partai politik.

Menanggapi masalah ini, harian *Pedoman* pada edisi 6 Oktober 1954 kembali menyampaikan kritik lewat sebuah tajuk rencana yang berjudul “*Korupsi dan alternatif lain*”. Berikut adalah petikan yang cukup penting dari tajuk rencana tersebut:

“...akan tetapi sekarang, bulan Oktober tahun 1954, sesudah kabinet Ali-Wongso memerintah lebih setahun, Indonesia tidak dapat lagi seolah2 menepuk dada dan memandang rendah kepada kedua negeri tsb diatas (Filipina dan Siam, pen.). Kalau bitjara perkara korupsi, tjara meluasnja di kalangan pemerintahan, politici, partai2, dll, Indonesia boleh dibilang sudah pegang “record” di Asia Tenggara.

Korupsi di negeri kita sekarang mungkin sudah menjamai apa jang pernah terlihat di Tiongkok di zaman Chiang Kai-Sek. Semua ini tidak sedikit disebabkan politik Iskaq dengan sistim pembagian lisensi2 istimewaja itu.

Korupsi jang telah meluas ini dan jang merusak achlak banjak orang2 jang duduk dalam appaarat pemerintahan perlu benar mendapat perhatian kita semua.

Maka jang perlu kita lakukan sekarang ialah memadjukan serta merumuskan alternatif baru dan lain, jang akan dapat mengubah keadaan dalam batas2 kemungkinan objektif. Dan alternatif ini pulalah jang kita tunggu2 dari partai2 oposisi, supaja lebih2 djelas dirumuskan di hadapan rakjat banjak, jang tidak puas dengan keadaan sekarang” (Pedoman, 6 Oktober 1954).

Dari tulisan ini terlihat bagaimana kritik *Pedoman* tentang kasus korupsi yang merajalela pada masa kabinet Ali disamakan dengan praktik korupsi yang pernah terjadi di Tiongkok pada masa rezim nasionalis Chiang Kai-Sek, yang memang terkenal sangat koruptif.

Selain itu, lagi-lagi *Pedoman* mengingatkan pembaca perihal skandal lisensi-istimewa Iskaq yang diyakini sebagai penyebab suburnya korupsi pada masa pemerintahan Ali. Di bagian konklusi, solusi yang coba ditawarkan cukup cerdas, bukan dengan memajukan kebijakan atau cara tertentu untuk memberantas korupsi, tapi justru mengajak pembaca untuk menunggu solusi dari pihak oposisi, yang tak lain maksudnya adalah supaya pihak oposisi segera diberi kesempatan untuk memimpin pemerintahan.

c. Polemik dengan PKI

Di antara beberapa serangan politik yang diarahkan harian *Pedoman* kepada PKI, polemik tentang penggunaan kalimat “PKI dan orang tak berpartai” pada surat suara milik PKI untuk pemilu yang paling banyak mendapat sorotan.

Hal ini disebabkan oleh penggunaan kalimat tersebut diyakini merupakan kecurangan PKI dalam mengikuti pemilu. Selain itu, polemik ini tidak saja melibatkan antara partai pemerintah dan partai oposisi, namun juga menciptakan ketidakharmonisan di barisan partai pemerintah sendiri, sebab partai NU juga merasa keberatan dengan strategi yang digunakan PKI tersebut.

Dalam masalah ini, PKI yang sudah “dikeroyok” oleh banyak pihak masih bersikeras

untuk menggunakan kalimat tersebut dalam pemilu mendatang. Sejak pertengahan tahun 1954 polemik ini terus bergulir dan baru selesai pada Januari 1955 ketika akhirnya PKI terpaksa menanggalkan kalimat tersebut dalam surat suara miliknya.

Harian *Pedoman* sebagai koran yang beroposisi dengan PKI tentu saja tidak menyalakan kesempatan ini dengan mengeksploitasinya sebagai serangan politik. PKI digambarkan sebagai partai yang “culas” dan “menghalalkan segala cara” demi mencapai tujuan politiknya. Berikut ini adalah kutipan opini yang ditulis oleh Rosihan Anwar dan dimuat dalam kolom tajuk rencana harian *Pedoman* pada tanggal 8 Juni 1955:

“tjara jang demikian itu memang siasat jang tidak pantas, karena pada hakekatnja bersifat menipu para pemilih serta mengeksploirtir kebodohan masjarakat. Pertimbangan di belakang siasat itu mudah dapat dilihat oleh orang jang tahu politik. Tetapi sebaliknya orang jang kurang besar perhatiannja akan soal-soal politik dan jang karenanja djuga tidak mendjadi anggauta suatu partai, sudah terang mudah dapat terdjebak oleh siasat PKI jang menjamakan diri dengan orang-orang jang tak berpartai ini” (Pedoman, 8 Juni 1955).

Selain masalah surat suara PKI yang terus diekspos, harian *Pedoman* pada bulan September 1954 juga melakukan serangan politik kepada PKI. Kali ini tema yang diangkat oleh harian *Pedoman* adalah peringatan Peristiwa Madiun tahun 1948, yang menggunakan istilah “pemberontakan PKI” untuk menekankan siapa pelaku dalam peristiwa tersebut.

Setiap bulan September memang seakan menjadi momentum bagi partai-partai anti-komunis untuk mengingatkan dosa-dosa PKI di masa lalu, sedangkan bagi PKI bulan September adalah waktu bagi mereka untuk melakukan pelurusan sejarah dan mengadakan pembelaan atas tindakan partai pada masa lalu.

Bahkan untuk menepis anggapan bahwa dalam Peristiwa Madiun 1948 pelakunya adalah PKI, pidato D.N. Aidit di dalam sidang DPR pada 11 Februari 1957 sampai diterbitkan menjadi buku berjudul *“Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 – Peristiwa Sumatera 1956”* yang isinya justru menyatakan, bahwa dalang sesungguhnya dari peristiwa tersebut adalah Bung Hatta, Natsir, dan tokoh-tokoh Masjumi, yang ketika itu mengisi jabatan pemerintahan (Aidit, 1964).

Dalam peringatan Peristiwa Madiun 1948 pada tahun 1954, harian *Pedoman* menurunkan satu artikel sejarah yang berjudul *“Pemberontakan PKI di Madiun, Ribuan Orang Dibunuh Setjara Kedjam”* pada halaman pertama, dan satu tajuk rencana yang ditulis oleh Rosihan Anwar dengan judul *“Djangan Lupa 18 Sept.1948”*. Tajuk rencana tersebut berisi peringatan bagi rakyat untuk belajar dari sejarah tentang “kemunafikan” PKI yang pandai bermain retorika, namun berlawanan dalam praktiknya. Berikut kutipan penting dari tajuk rencana tersebut:

“Tudjuan komunis selalu adalah untuk merebut kekuasaan sepenuhnya didalam negeri. Djika dapat ditempuh tjara parlementer, ditempuhlah tjara itu, sehingga dalam keadaan jang demikian itu partai komunis selalu berkedok sebagai “pembela-pembela kemerdekaan berapat”, “pembela kebebasan berorganisasi”, dsb.

...sebelum kaum komunis melantjarkan pemberontakannja di Madiun 6 tahun jl, mereka selalu berbitjara tentang “front nasional”, “front demokrasi rakjat”, dsb.,

jang achirnja makanja dapat dilihat dari pidato Muso pada tgl. 8 September 1948 jang mengatakan, bahwa "revolusi kita adalah bagian daripada revolusi dunia jang dipimpin oleh Rusia".

..PKI dapat bitjara tentang "front nasional" dll. Tetapi jang ditudju tetap adalah kepentingan Sovjet Rusia dengan "demokrasi rakjat" lainnja. Karena itu djanganlah kita lupa akan tanggal 18 September 1948 hari pemberontakan PKI di Madiun" (Pedoman, 18 September 1954).

Di samping kedua konten yang telah diuraikan di atas, terdapat satu lagi konten yang cukup menarik yang diangkat oleh *Pedoman* selama masa kampanye. Beberapa bulan menjelang pelaksanaan pemilu harian *Pedoman* semakin sering menerbitkan liputan-liputan tentang kegiatan PSI. Salah satu kegiatan yang diliput oleh *Pedoman* adalah pidato Sutan Sjahrir selaku ketua umum PSI dalam rapat terbuka pada peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.

Dalam pidatonya tersebut, Sjahrir mengatakan bahwa "resep" PKI bagi perbaikan taraf hidup kaum buruh justru membingungkan. Seperti yang tertera dalam *Pedoman* edisi 2 Mei 1955, berikut adalah petikan pidato Sjahrir tersebut:

"Kata PKI/SOBSI, ada 5 hal jang harus dilakukan agar buruh bisa mengatasi kesulitan hidupnja: 1. Buruh harus menjokong perdjuaan Irian Barat, 2. Buruh harus berdiri di belakang konferensi A-A, 3. Buruh harus menjokong pemerintah Ali-Arifin jang katanja progressip ini, 4. Buruh harus sokong kongres Indonesia Raja, dan 5. Untuk keluar dari kesulitan hidup sekarang, buruh harus menjokong PKI/SOBSI untuk dapat mengalahkan Masjumi dan PSI dalam pemilihan umum nanti.

Maka Sjahrir bertanja apa hubungan kelima resep dari komunis ini dengan sulitnja buruh mentjari kain blatju, naiknja tjabe, dsb?".(Pedoman, 2 Mei 1955).

Dari liputan pidato tersebut, tampak bagaimana Sutan Sjahrir berusaha menarik hati kaum buruh dan membuka pikiran kaum buruh bahwa solusi yang ditawarkan PKI sangat konyol, tidak masuk akal, dan sarat dengan muatan politis.

(2) Setelah Kongres II PSI

Setelah menggelar Kongres II pada tanggal 5-12 Juni 1955, PSI mulai mengintensifkan kegiatan kampanyenya. Hal yang sama terlihat pula pada harian *Pedoman* yang mulai sering menerbitkan konten kampanye PSI, baik berisi program-program PSI maupun seruan untuk memilih PSI pada gelaran pemilu.

Kongres II PSI menghasilkan banyak keputusan penting bagi partai, di antaranya adalah struktur susunan kepemimpinan partai yang baru dan kebijakan untuk mengubah keanggotaan partai yang dibuka untuk massa. Selain itu, partai juga kembali menegaskan ideologi sosialisme kerakyatan sebagai asas partai lewat sebuah keputusan politik (Rusdi 1997: 52). Berikut adalah beberapa konten kampanye yang diterbitkan oleh harian *Pedoman* setelah Kongres II PSI.

a. Program Agraria PSI

Sebagai partai yang bercorak sekuler netral-agama dan berorientasi nasional, PSI menyadari bahwa program yang dapat mereka tawarkan kepada publik bukanlah isu-isu keagamaan atau kedaerahan. Selain itu PSI juga tidak tertarik untuk memainkan politik identitas di tengah masyarakat yang majemuk. PSI menyadari bahwa satu-satunya hal yang dapat menyatukan manusia tanpa memandang ikatan keagamaan, ras, etnis, dan bahasa, adalah kepentingan ekonomis, karena setiap manusia manapun pasti menginginkan kehidupan yang baik dan sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut PSI menonjolkan diri sebagai partai yang selalu memikirkan kebutuhan ekonomi rakyat. PSI berbeda dengan partai Masjumi dan partai-partai agama lain yang lebih banyak memainkan sentimen keagamaan dan narasi anti-komunis untuk menarik massa pendukung.

Melihat bahwa bagian terbesar rakyat Indonesia mencari penghidupan dari sektor pertanian, PSI merumuskan program yang dijanjikan dapat mengeluarkan masyarakat tani Indonesia dari kesengsaraan dan penindasan yang diakibatkan oleh sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme.

Isu-isu agraria yang sering mengemuka di tengah masyarakat dibahas dalam Kongres II PSI. Kemudian isu-isu tersebut dirumuskan menjadi program politik yang siap ditawarkan oleh PSI kepada konstituen. Harian *Pedoman* se usai kongres berakhir segera menyosialisasikan detail program agraria yang disusun oleh PSI, agar pembaca dapat mengetahui, menimbang, dan kemudian menyetujui program tersebut, yang pada akhirnya mereka akan memberikan suaranya bagi PSI dalam ajang pemilu.

Pada edisi 14 Juni 1955 harian *Pedoman* pada halaman kedua surat kabarnya memuat program tersebut dalam artikel yang cukup panjang. Berikut ini adalah kutipan yang cukup penting untuk disimak dari artikel tersebut:

“Setelah mengemukakan dasar2 pikiran tentang masalah desa, di mana a.l dikatakan bahwa desa harus merupakan masjarakat kerakjatan jang mengandung kekuatan2 sosial, politik, dan ekonomi jang aktif, maka pra nasehat tani jang disetudjui oleh Kongres PSI itu telah mendjelaskan pelaksanaan politik agraria baru, jang pokok2nja sbb:

1. *Menghapuskan semua hak istimewa atas tanah:*
 - a. *Hak erfpacht, konsesi, eigendom, tanah partikelir, dan semua hak barat lainnja di seluruh Indonesia*
 - b. *Semua hak feodal swapradja atas tanah dan hak istimewa lainnja (tanah perdikan, ongkos2, dsb)*
2. *Mentjapai minimum luas tanah bagi tiap keluarga tani dan membatasi luas milik tanah dengan batas maksimum, ditjapai dengan:*
 - a. *Pemindahan keluarga tani dari daerah jang padat penduduknja dan sangat ketjil milik tanah tiap2 tani (Djawa, Bali, dll) ke lapangan sumber penghidupan lainnja (industri keradjinan) di daerah itu sendiri*
 - b. *Pemindahan keluarga tani jang ada di daerah itu sendiri*
3. *Modernisasi pertanian (elektripikasi, mekanisasi) di samping perubahan/pembaharuan sistim dan struktur pertanian rakjat jang rasionil dan efisien*
4. *Pembukaan sumber2 penghidupan baru (industri dan keradjinan)*
5. *Pembukaan djalan2 dan persediaan alat2 perhubungan dari dan ke daerah2 pertanian”(Pedoman, 14 Juni 1955).*

Demikian 5 poin dari program agraria yang ditawarkan oleh PSI kepada rakyat Indonesia. Dari program agraria tersebut selain tercermin visi pengembangan sektor pertanian yang bersifat jangka panjang, juga dapat dilihat solusi yang ditawarkan oleh sosialisme kerakyatan PSI untuk mengakhiri kesengsaraan kaum tani, yaitu penghapusan hak-hak istimewa atas tanah yang dimiliki golongan tertentu.

Dari program tersebut tercermin pula konsistensi PSI dalam merealisasikan ideologi politiknya ke dalam program partai. Dalam visi politiknya, PSI sangat menentang praktik feodalisme dan kolonialisme yang menyebabkan kesengsaraan rakyat. Kemudian penentangan terhadap kedua musuh laten itu dituangkan ke dalam program politik yang menjanjikan perubahan radikal pada sektor agraria dengan menghapuskan hak-hak istimewa atas tanah yang dimiliki oleh golongan feodal dan swasta asing.

Bagi golongan tuan tanah yang memiliki beribu-ribu hektar tanah dan menikmati keuntungan yang besar dari kepemilikan tanah tersebut, program agraria PSI merupakan ancaman serius bagi kepentingan mereka. Tentu golongan ini akan terusik bila program tersebut diterapkan apabila PSI berhasil memenangi pemilu. Namun sebaliknya, hal itu merupakan janji yang menggiurkan bagi jutaan kaum tani di Indonesia yang berharap lepas dari jeratan kemiskinan yang sistematis.

Program itu juga menunjukkan visi partai yang berorientasi jauh ke depan dengan mengusahakan transmigrasi petani dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih memiliki banyak lahan kosong. Kelak, program transmigrasi ini baru terealisasi secara nyata pada masa kekuasaan Orde Baru.

Di samping kelima program agraria tersebut, terdapat juga solusi yang ditawarkan bagi kaum tani yang terlilit hutang. Berikut adalah petikan dari artikel yang sama:

"kaum tani kadang2 harus menggadaikan mendjual tanahnja dan berhutang jang djumlahnja melampaui kemampuannja sendiri, pra nasehat tani jang disetudjui kongres PSI menjatakan a.l bahwa untuk menjusun masjarakat tani jang sehat, maka "penjakit" tani ini harus disembuhkan dulu.

Tjara satu2nja ialah pembekuan hutang rakjat tani jang dinjatakan dan diatur oleh undang2. Pokoknja pembekuan ini bertudjuan merubah djangka waktu pengembalian pindjaman tadi dari satu musim kepada djarak waktu sedikitnja 3 tahun dengan ketetapan bunga tidak lebih dari 9% untuk 1 tahun." (Pedoman, 14 Juli 1955).

Janji PSI ini bagi kaum tani tentu terdengar sangat rasional karena mengenai langsung persoalan hidup sehari-hari mereka. Di sini juga dapat dilihat terobosan berani PSI untuk menetapkan pembekuan kredit kaum tani ini ke dalam suatu undang-undang. Persoalannya adalah bukan tentang apakah PSI akan menerapkan program agraria tersebut atau tidak, tetapi mampukah PSI memenangi pemilu mendatang.

b. Seruan Sosialisme Kerakyatan PSI

Semakin mendekati waktu pelaksanaan pemilu, harian *Pedoman* kian menggencarkan kampanye PSI dalam terbitan-terbitannya. Salah satu edisi yang memuat kampanye PSI dan menarik untuk dicermati adalah terbitan *Pedoman* pada 26 Juli 1955. Dalam edisi tersebut *Pedoman* menurunkan liputan kegiatan ketua umum PSI Sutan Sjahrir yang berkampanye dalam rapat umum di kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pada liputan tersebut ditampilkan pernyataan Sjahrir yang menjelaskan kepada rakyat

tentang sosialisme kerakyatan yang dianut oleh partainya. Jika pada kampanye-kampanye sebelumnya materi kampanye lebih bersifat tematik, dalam artian mengupas soal-soal tertentu, pada rapat umum tersebut Sjahrir menerangkan ideologi yang dianut partai.

Berikut adalah kutipan dari liputan yang dimuat pada halaman pertama edisi tersebut:

“Dengan menjajuknja pembaharuan tentang soal2 kemasjarakatan ini, PSI menitikberatkan pada azas tudjuannja ialah negara sosialisme kerakjatan. Ini berarti membikin negara baru jang lain daripada negara kita sekarang ini. rentjana pembaharuan desa, rentjana pembaharuan ekonomi, keuangan, kebudajaan, dsb telah tertjantum dan akan terpetjah dengan sendirinja dalam organisasi jang mendapat dukungan dari rakjat seluruhnja.

Tapi rentjana pembangunan jang bagaimanapun baiknja tidak akan bisa dilaksanakan sebelum rakjat lepas dari rasa keketjewaannja, ialah setelah mengalami hidup, terutama dua tahun belakangan ini, jang sangat berat, jang disebabkan oleh perbuatan pemimpin2 negara jang tidak djudjur dan hanja memperkaja dirinja sendiri.”(Pedoman, 26 Juli 1955).

Pidato Sjahrir tentang sosialisme kerakyatan yang dimuat dalam *Pedoman* tersebut dapat dikatakan merupakan hal yang berani sekaligus langka dilakukan oleh partai-partai dalam masa kampanye. Dikatakan berani karena dengan jelas Sjahrir menjanjikan “negara yang baru” apabila PSI dan sosialisme kerakyatannya menang.

Persepsi banyak orang ketika mendengar rencana untuk membentuk negara baru, dapat berarti sebagai usaha untuk merobohkan negara yang telah ada. Menurut Sjahrir persoalannya adalah bukan apakah boleh mendirikan “negara baru” atau tidak, tapi adalah apakah “negara baru” tersebut mampu membawa rakyat kepada kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu dengan ideologi sosialisme kerakyatan.

Dikatakan langka karena selama masa kampanye berlangsung, jarang sekali ada tokoh partai yang berani membuka visi partai yang sesungguhnya bagi Indonesia. Partai-partai Islam yang diyakini akan mendirikan Negara Islam apabila menang dalam pemilu, selalu berkelit antara iya dan tidak ketika disodorkan pertanyaan tentang rencana mendirikan Negara Islam. Kemudian PKI yang diyakini akan mendirikan Negara Komunis seperti di Rusia dan Tiongkok juga membantah dengan beragam argumentasi.

Sjahrir dengan berani menyatakan bahwa mereka akan mendirikan “negara baru” dengan sosialisme kerakyatan sebagai landasannya. Dalam hal ini harian *Pedoman* memainkan peranan yang sangat penting artinya untuk memberi penerangan seluas-luasnya pada khalayak pembaca.

Selain niat untuk membentuk “negara baru” yang membawa rakyat pada kesejahteraan, Sjahrir juga tidak lupa untuk menyelipkan kritikan pada lawan politiknya, yaitu pemerintahan Ali dan partai koalisinya yang menyebabkan penderitaan rakyat.

Seruan PSI kepada rakyat mengenai gagasan sosialisme kerakyatan yang diembannya kembali bergema setengah bulan menjelang pemilu parlemen digelar. Dalam harian *Pedoman* edisi 14 September 1955, dimuat liputan kegiatan yang dilakukan oleh ketua umum PSI Sutan Sjahrir pada kampanye partainya di kota Bogor. Pada liputan tersebut harian *Pedoman* memuat seruan Sjahrir kepada rakyat yang berisi ajakan untuk menguji program-program PSI dengan memilih partainya pada pemilu yang akan segera berlangsung.

Selain itu, Sjahrir juga menjelaskan perbedaan PSI dengan kelompok sosialis lainnya yang ada di Indonesia. Menurut Sjahrir, kalau rakyat memilih PSI dan ternyata program-programnya tidak membawa perbaikan hidup, rakyat bisa mengganti pilihannya pada

pemilu selanjutnya. Namun demikian golongan sosialis lainnya, meskipun program-programnya terbukti tidak membawa manfaat, tidak mau diganti lagi.

Lebih lanjut, dalam rapat umum tersebut Sjahrir memaparkan perbedaan pandangan antara PSI dan golongan sosialis lainnya dalam memandang agama. Sjahrir menjelaskan bahwa isu yang dihembuskan bahwa “PSI anti-agama” memang sengaja dimunculkan oleh golongan sosialis lainnya yang memang anti-agama.

Bagi PSI sendiri, justru kaum beragama adalah kelompok yang dianggap baik untuk diajak bekerjasama dalam menyusun masyarakat sosialisme kerakyatan. Selain itu Sjahrir juga menjelaskan bahwa meskipun PSI dan golongan sosialis lain sama-sama mendasarkan asas partainya pada materialisme-historis dari Marx dan Lenin, namun PSI hanya mengambil inti ajaran tersebut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia (*Pedoman*, 14 September 1955).

Di sini dapat dilihat kesungguhan PSI untuk membedakan dirinya dengan kelompok sosialis lainnya yang ada di Indonesia yang sering menimbulkan perselisihan dengan kelompok agama. Jika dilihat sepintas lalu memang orang dapat menyimpulkan bahwa PSI tidak berbeda dengan sosialis lainnya, karena sama-sama berasaskan materialisme-historis Marxisme. Kerancuan dalam memandang persoalan ini pun masih diwarisi hingga generasi sekarang, yaitu orang sering menggeneralisasi sosialisme kerakyatan sama dengan komunisme.

Kapasitas Sjahrir sebagai pimpinan sekaligus ideolog partai dalam hal ini memang tidak disangsikan lagi. Sjahrir mampu menjelaskan kepada rakyat suatu persoalan yang sebenarnya berada pada ranah filosofis. Sebagai partai yang mengklaim sebagai partai intelektual, PSI menyadari bahwa tugasnya bukan semata menawarkan kepada rakyat program-program pragmatis, namun juga mendidik rakyat tentang soal-soal filosofis seperti ideologi, namun dalam bahasa yang bumi-berbumi seperti yang ditunjukkan oleh Sjahrir.

c. Program Pendidikan PSI

Di antara berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an salah satunya adalah sektor pendidikan. Jatuh banggunya kabinet yang disebabkan oleh instabilitas politik dalam negeri, mengakibatkan program-program yang telah disusun tidak dapat berjalan optimal. Selain itu kehidupan masyarakat pada masa itu sangat terpolitisasi, di mana sekat-sekat ideologis dan politis terlihat secara jelas. Akibatnya bidang selain daripada politik dianggap tidak terlalu penting, termasuk di antaranya adalah pendidikan.

Padahal pendidikan merupakan *sokoguru* peradaban dari suatu bangsa. Hal ini turut disadari pula oleh PSI. Sebagai partai yang mendaulat diri sebagai partai intelektual, tentu beban moral yang diemban oleh PSI untuk mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan lebih besar daripada partai lainnya.

Maka dalam masa kampanye Pemilu 1955 PSI menyusun program pendidikan yang ditawarkan kepada rakyat dan akan diterapkan apabila partai ini memenangi pemilu. Untuk mengetahui pendidikan seperti apa yang dikehendaki oleh PSI dapat disimak sebuah artikel yang dimuat pada halaman 2 dalam harian *Pedoman* edisi 9 September 1955.

Artikel berjudul “*Pendidikan untuk produksi*” tersebut memuat jawaban Sutan Sjahrir atas pertanyaan yang diajukan kepada PSI tentang bagaimana pendidikan yang ideal. Berikut adalah petikan jawaban Sjahrir dalam artikel tersebut:

“Pendidikan jang sampai sebegitu djauh tak memperoleh perhatian sepenuhnja dari kabinet2 jang pernah memerintah di Indonesia, oleh PSI kini dimasukkan sebagai faktor terpenting dalam programnja. Pendidikan harus diatur demikian rupa, sehingga anak2 dapat mentjintai tanah tumpah darahnja dan dapat mengabdikan pada nusa dan bangsa.

Sjahrir mengatakan pula bahwa produksi ada mendjadi kuntji dari kemakmuran. Ini ada suatu kenjataan, jang tak dapat dibantah. Maka itu pokok perdjuaan dari PSI didasarkan pada produksi. Djuga pendidikan harus disesuaikan pada produksi. Oleh karena kita kekurangan ahli, maka kita harus lebih banjak mendidikan ahli2 terbaik.

Djika kita hendak membikin madju produksi pertanian, mulai dari sekolah2 sampai sekolah2 universitas harus diberikan lebih banjak peladjaran mengenai pertanian. Demikian djuga djika kita hendak membikin madju industri. Pendeknja pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk memperbesar produksi.” (Pedoman, 9 September 1955).

Penjelasan Sjahrir tentang pendidikan yang ideal menurut PSI tersebut sangat penting untuk dicermati. Menurutnyanya, pendidikan sebagai lembaga yang berperan untuk mencetak generasi penerus bangsa harus disesuaikan untuk kebutuhan produksi dalam dunia ekonomi.

Pemikiran yang termuat di dalam program pendidikan PSI yang dicetuskan oleh Sjahrir tersebut berasal dari paham materialisme yang menjadi pondasi ideologi sosialisme. Menurut paham materialisme segala sesuatu di dunia ini yang terpenting adalah materi (kebendaan), sedangkan aspek-aspek rohani atau spiritual dianggap tidak ada, atau minimal tidak penting (An-Nabhani, 2016: 48). Konsekuensinya, konsep-konsep yang lahir dari paham materialisme hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan materi. Hal inilah yang tercermin dari program pendidikan PSI, walaupun secara eksplisit hanya memenuhi kebutuhan pragmatis seperti kekurangan tenaga ahli, dan sebagainya.

Hal ini berbeda dengan konsep pendidikan yang lahir dari ajaran agama atau paham spiritual, yang mengajarkan bahwa pendidikan diadakan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan materi seperti produksi, namun juga menciptakan manusia yang bermoral dan memiliki akhlak mulia.

Keterangan yang diberikan oleh Sjahrir ini memberikan pelajaran yang penting tentang partai-partai yang setia pada asas dan ideologi yang dianutnya. Ideologi bukan sekedar kalimat gagah yang terpampang pada anggaran dasar partai semata, tapi dituangkan ke dalam cara berpikir serta program politik.

d. Posisi Agama dalam Program PSI

Dibanding dengan PKI, posisi PSI di hadapan kaum beragama di Indonesia relatif lebih aman karena sikapnya yang moderat dan tidak memiliki rekam jejak yang kelam kepada agama layaknya PKI dan ideologi komunismenya. Namun demikian, menjelang pemilu digelar isu yang sepertinya mustahil diarahkan pada PSI, ternyata datang menghampiri juga. PSI yang menganut ideologi sosialisme dituduh “berkitab suci” buku *Das Kapital* karangan Karl Marx.

Isu sensitif ini sudah sejak lama dijauhi oleh PSI, karena bagaimanapun mendapatkan stigma negatif sebagai partai anti-agama di tengah-tengah masyarakat yang religious sangat tidak menguntungkan. Bagi masyarakat awam yang kurang mengerti tentang

perbedaan antara sosialisme yang dianut oleh PSI dan sosialisme ekstrem (komunisme) yang dianut oleh PKI, akan menelan mentah-mentah isu tersebut hanya karena kesamaan label, yaitu sama-sama mengakui sosialisme.

Untuk membantah isu tersebut harian *Pedoman* memuat liputan yang berisi pidato Hamid Algadri dalam rapat umum PSI di Sumenep, yang berisi penjelasan tentang asas, haluan, serta sikap PSI pada agama secara umum. Berikut ini adalah petikan liputan dari *Pedoman* edisi 9 September tersebut:

“Dikatakan, bahwa Karl Marx tidak lebih dari seorang ahli ekonomi dan buku Das Kapital bukanlah Qur’an yang tidak boleh dikupas atau dikritik. Lebih djauh ditegaskan, bahwa PSI tetap menghormati agama.

Tentang sosialisme diterangkan bahwa bagi PSI inti dari sosialisme adalah menolong dan melindungi kaum melarat dari tangan kelaliman, melepaskan penghisapan si kuat terhadap si lemah. Untuk mentjapai maksud tersebut, menurut pembitjara tidak harus ditjari baik buruk orangnja, tetapi pada sistim ekonominja.” (*Pedoman*, 9 September 1955).

Dari kutipan liputan tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa PSI hanya menjadikan sosialisme sebagai pisau analisis dalam memandang kondisi masyarakat. Sosialisme yang diyakini oleh PSI akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat berbeda dengan sosialisme yang diyakini oleh komunisme dan PKI. Sosialisme PSI adalah sosialisme yang terbatas pada *economisch-stelsel* (sistem ekonomi), bukannya suatu pandangan hidup yang harus berbenturan dengan keyakinan agama.

Artikel yang dimuat *Pedoman* itu juga menggambarkan bagaimana PSI memahami sosialisme sebagai nilai filosofis yang ideal, yang tidak ada lagi penindasan dan kezaliman yang dirasakan si miskin akibat eksploitasi si kaya. Dengan kata lain cakupan sosialisme PSI sangat luas dan memuat nilai-nilai universal yang luhur.

Sikap kader-kader PSI dan harian *Pedoman* menunjukkan kehati-hatian untuk bersinggungan dengan isu agama yang sensitif. Selain itu harian *Pedoman* jauh sebelum tuduhan anti-agama ini muncul juga sudah melakukan pendekatan pada kaum agama, terkhusus Islam. Setiap hari Jumat, harian *Pedoman* selalu menyediakan rubrik khusus yang bernama “Mimbar Agama” yang terletak pada halaman tiga. Rubrik tersebut berisi karangan tentang keislaman dan kemasyarakatan, dan bahkan tidak jarang pula memuat karangan tentang hubungan Islam dengan politik atau negara.

Jadi isu anti-agama yang sempat menyasar PSI tidak sampai menyebabkan partai tersebut sebagai *common enemy* bagi kaum beragama berkat strategi kooperatif yang dilakukan oleh partai dan organ partainya.

4. Simpulan

Peran sebagai “corong suara” yang dimainkan oleh harian *Pedoman* bagi PSI dilakukan dengan strategi yang unik, yaitu dengan mengkampanyekan gagasan-gagasan PSI secara tidak langsung. Ketika terjadi suatu polemik di tengah masyarakat, PSI tidak serta-merta mengajukan konsepsi-konsepsi PSI sebagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut, namun dengan menyisipkan ide-ide ala PSI secara implisit.

Hal itu ditempuh karena harian *Pedoman* memang relatif tidak terlalu terang-terangan menunjukkan afiliasi politiknya dengan PSI, karena *Pedoman* bukanlah surat kabar yang terikat langsung secara struktural dengan organisasi partai (*party-directed*). Hal ini

berbeda dengan surat kabar lain seperti *Harian Rakjat* (milik PKI) dan *Abadi* (milik Masjumi), yang terikat secara langsung dengan partai.

Namun demikian, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 1955, harian *Pedoman* pun mengalami transformasi dalam konteks sebagai corong suara bagi PSI. Transformasi yang ditunjukkan harian *Pedoman* tercermin dari perubahan corak redaksinya yang sebelumnya terkesan “malu-malu” untuk menunjukkan afiliasi politik dengan PSI, menjadi surat kabar yang terang-terangan mendukung PSI dalam Pemilu 1955. Perubahan drastis itu terjadi setelah Kongres II PSI digelar pada bulan Juni 1955. Sejak saat itu harian *Pedoman* dengan gencar dan terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada PSI dalam Pemilu 1955.

Gagasan serta program partai yang telah disusun pada Kongres II PSI, disosialisasikan dalam terbitan-terbitan harian *Pedoman*. Program partai yang dimuat oleh harian *Pedoman* mencakup beragam bidang, mulai dari program pendidikan, agraria, ideologi, hingga soal keagamaan. Hal itu tidak terlepas dari kepentingan untuk meyakinkan pembaca dan konstituen untuk memilih PSI dalam Pemilu 1955.

Pada masa kampanye menjelang Pemilu 1955 terjadi inkonsistensi sikap harian *Pedoman* yang semula mengekspresikan slogannya di bawah kop surat kabar ini, yaitu sebagai “Pengemban Suara Rakyat Merdeka”, ke orientasi kepentingan ideologis para pengasuhnya.

“Rakyat” merupakan konsep yang luas, tidak terikat kepada golongan atau kelompok apapun. Biasanya kepentingan atau “suara” rakyat mencakup persoalan-persoalan yang bersifat umum, seperti tuntutan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan sebagainya. Seseorang atau sekelompok orang (dalam hal ini surat kabar) tidak bisa sembarangan dalam menggunakan istilah “rakyat” untuk menyuarakan aspirasi atau tuntutan tertentu, apalagi jika istilah rakyat “dicatut” untuk kepentingan kelompok atau golongan sendiri.

Selama masa kampanye Pemilu 1955, persepsi harian *Pedoman* mengenai “rakyat” sebagai subjek dalam slogan surat kabar, mengalami perubahan. “Rakyat” yang dimaksud tidak lagi merujuk kepada masyarakat umum yang aspirasi serta kepentingannya harus disuarakan oleh harian *Pedoman*. “Rakyat” kini dipahami sebagai kelompok masyarakat yang setuju kepada gagasan-gagasan PSI, dan tidak sepakat kepada gagasan-gagasan lawan politik PSI. Singkatnya, konsep “rakyat” dalam persepsi baru harian *Pedoman* telah tereduksi, sehingga menjadi “rakyat” yang mendukung ideologi serta program PSI.

Kepentingan politik dalam konteks untuk membantu partai meraih suara sebanyak-banyaknya memang tidak mendorong harian *Pedoman* secara “bulat-bulat” untuk “mengkhianati” slogannya sendiri, namun kepentingan politik itu telah mendorong pergeseran sikap harian *Pedoman* dalam mematuhi slogannya, yaitu sebagai pengemban suara rakyat.

Referensi

1. Bittner, John, *Mass Communication*, (Massachusetts: Needham Heights, 1996).
2. Abidin, Nur Fatah, “Refleksi Pemikiran Soedjatmoko: Sejarah dan Historiografi Indonesia” (https://www.academia.edu/16498930/Refleksi_Pemikiran_Soedjatmoko_Sejarah_dan_Historiografi_Indonesia, diunduh pada 2 Agustus 2020).
3. Aidit, D.N., *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948-Peristiwa Sumatera 1956* (Jakarta: Jajasan “Pembaruan”, 1964).

4. An-Nabhani, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terjemahan Abu Amin, dkk (Jakarta: HTI Press, 2016).
5. Anwar, Rosihan, *Menulis Dalam Air: Sebuah Otobiografi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).
6. Argenti, Gili, "Kiprah Politik Partai Sosialis Indonesia", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol.2, No.1, 2017.